



Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran XIX

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



DPMPTSP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja PD sebagai persiapan penyusunan Renja PD. Penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,

penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2027 didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang berpedoman pada RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029.
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Review Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program kerja dan kegiatan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah untuk memberikan

arah kebijakan dalam mencapai sasaran program kerja dibidang urusan penanaman modal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RENSTRA
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

Capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga sampai dengan akhir bulan November Tahun 2025 dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 5.105.771.791,- dan terealisasi sebesar Rp 4.048.813.271,- atau 79,30% yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 5.083.244.391,- (lima miliar delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 4.025.559.216,- (Empat miliar dua puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah) atau sebesar 79,19%.

2. Belanja Modal

Pada Tahun anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp 22.527.400,- (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sebesar 88,34%.

Sedangkan jika dilihat dari program kegiatan terdiri dari

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp 4.596.790.217,- (empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 3.895.416.566,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 84,74%.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Anggaran untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

sebesar Rp 200.870.000,- (Dua Ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 31.635.100,- (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) atau sebesar 15,75%.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Anggaran untuk Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp 104.728.000,- (seratus empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 30.350.000,- (tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 28,98%.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Anggaran untuk program pelayanan penanaman modal sebesar Rp 62.700.000,- (Enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 22.527.550,- (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 35,93%.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran untuk program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp 118.156.174,- (seratus delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) yang terealisasi Rp 45.630.000,- (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 38,62%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025 dan capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025-2029 tersaji pada tabel TC-29.

Table 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Salatiga

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	92,3 100 77,1	89,4 100 77,05	90 100 77	89,4 100 77,05	99 100 100	92,3 100 77,1	89,4 100 77	99 100 100
1	06	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	100	6	6	100	6 laporan	2 laporan	
1	06	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6	100	6	6	100	6 laporan	2 laporan	
1	06	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30	20	26	26	100	26 Orang	26 orang	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2	1	1	1	100	1 dokumen	0 dokumen	
1	06	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1 paket	1 paket	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100	1 paket	1 paket	
					Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	1	1	1	100	1 paket	1 paket	

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Tangga	Disediakan							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	100	1 paket	1 paket	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	100	1 paket	1 paket	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	100	1 dokumen	1 dokumen	
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	1	100	1 paket	1 paket	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	100	1 Laporan	1 laporan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	1	1	100	11 laporan	1 laporan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	0	0	1 paket	1 paket	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	1	1	0	1 paket	1 paket	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	100	1 laporan	1 laporan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	100	1 laporan	1 laporan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	1	100	1 laporan	1 laporan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	100	1 laporan	1 laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	6	100	6 Unit	4 Unit	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	20	19	19	100	13 Unit	5 Unit	

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya								
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	1	1	1	100	10 unit	0 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	1	1	1	100	30 Unit	15 Unit	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	1	1	1	100	0	0	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1 Unit	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	0	1	1	1	100	0 unit	0 Unit	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN (miliar rupiah)	638,03	599,19	586,84	599,19	100	638,03	599,19	100
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal	3	1	1	1	100	1	1	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	1	0	0	0	1 dokumen	0 dokumen	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0	0	0	0	0	2 kegiatan usaha	0 kegiatan	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	1 dokumen	0 dokumen	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1 dokumen	0 dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN									

Kode					Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
					MODAL									
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (Pelaku Usaha)	370	359	370	359	97	370	359	97
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor berskala nasional (Pelaku Usaha)	370	359	370	359	97	370	359	97
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	1 Dokumen	0 dokumen	
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1	100	1	1	100	1 Dokumen	0 dokumen	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	97,8	99,26	92	99,26	100	97,8	99,26	100
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.000	3.412	3.000	3.412	100	3.000	3.412	100
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7876	998	1000			6000 Pelaku Usaha		
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	133	196	200			100 Kegiatan Usaha		
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0	1199	1200			10,000 Orang		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2	20	20			2 Kegiatan Usaha		

Kode					Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	70	66	70	66	75	70	66	75
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha kewenangan kab/kota yang menjadi sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal	120	100	120	100	75	120	100	75
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	200	200	200	100	100 Kegiatan Usaha.		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	399	100	100	100	100	300 Pelaku Usaha		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		133	100	100	100	100	100 Kegiatan Usaha		
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data (%)	80	80	80	75	80	80	75	80
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan								
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1	0	0	0	0	1 dokumen		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, tidak terlepas dari perannya dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu. Hasil pelayanan DPMPTSP dibidang pengelolaan sasaran yang telah ditetapkan melalui RPD 2023-2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Hingga akhir triwulan III Tahun 2025, upaya promosi penanaman modal di Kota Salatiga oleh Pemerintah Kota Salatiga sudah mulai membuahkan hasil. Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan III terdapat 359 investor berskala nasional, baik itu investasi dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA). Jumlah tersebut naik dibanding capaian Triwulan III tahun 2024 sebanyak 267 investor dan naik dibanding tahun 2023 yang sebanyak 256 investor, setelah sempat turun pada 2022 yang sebanyak 146 investor serta tahun 2021 dan 2021 yang hanya 62 dan 84 investor.

Dari hasil evaluasi antara target kinerja berdasarkan indikator kinerja dan realisasi yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat Indikator Kerja Utama (IKU) antara lain:

- a. Pada indikator pertumbuhan nilai investasi dari target pertumbuhan nilai investasi Tahun 2025 adalah kenaikan sebesar 10,40%, capaian pertumbuhan nilai investasi sampai dengan TW III tahun 2025 adalah -5,69%, karena capaian nilai investasi tahun 2024 adalah sebesar 634,853 Miliar rupiah sedangkan capaian nilai investasi hingga TW III Tahun 2025 adalah sebesar 599,190 miliar rupiah. Sedangkan dibanding trwulan III 2024 adalah Rp 342,979 miliar. Sehingga apabila dibandingkan capaian hingga triwulan III , maka pertumbuhan nilai investasi antar triwulan III Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah 74,70%.
- b. Pada indikator kinerja nilai investasi, sesuai dengan target dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026, untuk nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Salatiga adalah kenaikan 10,5%

dari capaian PMA tahun 2024 yaitu sebesar Rp378,889 miliar dan sampai dengan TW III tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 216,771 miliar atau -42,8%. Sedangkan pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan target kenaikan investasi 10,40% yaitu sebesar Rp 322,331 Miliar dengan capaian kinerja sampai TW III 2025 adalah sebesar Rp 382,419 miliar atau 18,6%.

- c. Pada indikator persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional dengan target 2025 adalah naik sebesar 4%, dari sebanyak 361 investor pada tahun 2024 turun menjadi 359 investor pada akhir TW III tahun 2025, sehingga capaian persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional Tahun 2024 adalah -0,6 % sampai dengan akhir TW III tahun 2025. Sedangkan dibandingkan dengan triwulan III Tahun 2024 dengan jumlah investor sebanyak 267 investor maka kenaikan jumlah investor berskala nasional antara trwiwulan III tahun 2025 dengan triwulan III 2024 adalah 34,46%.

Dari capaian indicator yang masih jauh dari target yang ditentukan dapat dijelaskan karena perbandingan capaian adalah capaian tahun yang lalu (2024), sedangkan capaian yang diukur saat ini adalah hasil triwulan III 2025, sehingga masih ada satu triwulan lagi untuk dapat menambah capaian kinerja. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga sampai dengan akhir TW III Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (tnn n- 1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)* (tw3)	Tahun 2027 (thn-n)	Tahun 2028 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10		12		13
1	Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN (%)			10,00	10,20	10,30	10,25	63,36	18,6	10,30	10,30	
2	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA (%)			10,00	10,25	10,50	10,75	-17,42	-42,8	10,50	10,50	
3	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) %			3,00	3,50	4,00	5,00	41,02	-0,6	4,0	4,0	
4	Pertumbuhan Nilai Investasi %			10,00	10,22	10,40	10,55	6,89	-5,62	6,91	6,92	

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Hingga akhir triwulan III tahun 2025 capaian kinerja perangkat daerah jika diukur dari indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dengan sasaran “**meningkatnya capaian realisasi investasi PMA dan PMDN**” dan indikator **Pertumbuhan Nilai Investasi**, baru terealisasi sebesar **-0,6%** artinya dibanding Tahun 2024 capaian investasi PMA dan PMDN mengalami penurunan dari capaian sebesar 6,89% pada tahun 2024, artinya dibanding Tahun 2024 capaian investasi PMA dan PMDN mengalami penurunan - 7,49% atau turun Rp 35,663 miliar dari nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp 634,853 miliar rupiah menjadi 599,190 miliar rupiah pada akhir TW III tahun 2025. Dan jika dilihat dari target pertumbuhan investasi tahun 2025 yang sebesar 10,40%, maka kinerja DPMPTSP pada tahun 2025 masih jauh target yang ditetapkan. Sehingga masih perlu kerja keras untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Dari hasil evaluasi kinerja tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya beberapa permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan investasi belum bisa menyamai atau melebihi capaian tahun sebelumnya.

Hal itu mengindikasikan adanya akar masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya promosi investasi, sehingga informasi tentang potensi daerah belum tersampaikan dengan baik kepada calon investor;
2. Kesiapan lokasi investasi serta kepastian proses perizinan berusaha belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan calon investor untuk menanamkan modal;
3. Pelayanan fasilitasi investasi belum optimal, khususnya dalam aspek penyelesaian permasalahan dan pendampingan bagi investor.
4. Peluang peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal.

- b. Peraturan daerah yang mengatur mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota/kota baru disahkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, mengindikasikan adanya akar permasalahan sebagai berikut:

1. Terbitnya ketentuan baru di tingkat pusat mengharuskan daerah melakukan penyesuaian terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis resiko, sehingga peraturan daerah yang ada perlu diperbarui agar selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
2. Ketidaksesuaian antara ketentuan teknis pusat dan daerah
3. Terbitnya ketentuan baru di tingkat pusat mengharuskan daerah melakukan penyesuaian terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis resiko, sehingga peraturan daerah yang ada perlu diperbarui agar selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
4. Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha dan verifikasi dokumen sebagian masih berlangsung manual dan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga memperlambat alur proses perizinan;

2.4. Review terhadap Renstra

Proses perbandingan antara RENSTRA dengan hasil analisis OPD dilakukan untuk mengetahui apakah RENSTRA sudah sesuai dengan kebutuhan OPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Rancangan awal RKPD untuk Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal terdiri dari 6 Program dan 12 Kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kota Salatiga Tahun 2025 – 2029 yang berfokus pada pencapaian RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025 – 2029.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Renja Tahun 2027:

Jumlah Program	: 6 Program
Jumlah Kegiatan	: 12 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 39 Sub Kegiatan
Pagu Renstra	: Rp 4.835.551.945,-
Pagu Kebutuhan Indikatif	: Rp 5.170.355.945,-

Review terhadap RENSTRA dapat dilihat pada tabel berikut, Tabel 2.3:

Tabel 2.3
Review Terhadap RENSTRA OPD tahun 2027
KOTA SALATIGA

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	RENSTRA OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA/ KOTA		- Indeks Kepuasan Masyarakat - Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	92,3 100 77,1	4.180.823	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA/ KOTA		- Indeks Kepuasan Masyarakat - Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	92,3 100 77,1	4.515.628	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.171	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.171	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	4.171	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	4.171	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJip, RTP, LKPD, RENJA, PUG, LPPD, PKT)	7	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJip, RTP, LKPD, RENJA, PUG, LPPD, PKT)	7	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.684.266	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.923.152	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	2.667.578	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	2.667.578	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	16.687	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	255.574	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.859	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.859	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang yang diamankan	30	20.859	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang yang diamankan	30	20.859	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				125.158	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				125.158	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	125.158	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	125.158	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				250.269	Administrasi Umum Perangkat Daerah				250.269	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.105	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Disediakan	1	8.105	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	13.172	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket	1	13.172	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	36.476	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	36.476	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	35.002	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	35.002	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	11.053	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	11.053	
	Penyediaan bahan/material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	Penyediaan bahan/material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	9.211	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	9.211	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	119.746	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	119.746	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Disediakan	1	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Disediakan	1	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	150.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	250.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				495.141	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				495.141	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	5.066	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	5.066	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	131.720	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	131.720	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	407.868	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	230.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				296.878	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				296.878	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	75.992	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	75.992	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	33.436	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	33.436	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	10.132	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	10.132	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	75.992	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	75.992	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	101.323	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	101.323	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					

	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN (miliar rupiah)	638,03	153.251	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	638,03	153.251	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal	2	114.938	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal	2	114.938	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	48.848	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	48.848	
	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	1	66.089	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	1	66.089	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi	1	38.312	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi	1	38.312	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0	

	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	38.312	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	38.312	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah investor berskala nasional (Pelaku Usaha)	370	104.307	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah investor berskala nasional (Pelaku Usaha)	370	104.307	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	370	104.307	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	370	104.307	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	24.307	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	24.307	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	80.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	80.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	97,8	240.709	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	97,8	240.709	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.000	240.709	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.000	240.709	

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	3.743	180.531	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	3.743	180.531	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	24	30.088	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan	24	30.088	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1	30.088	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	1	30.088	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2	0	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	70	124.366	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	70	124.366	

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha kewenangan kab/kota yang menjadi sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal	200	124.366	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha kewenangan kab/kota yang menjadi sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal	200	124.366	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12	25.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12	25.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120	74.366	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120	74.366	
	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan elaksanaan Perizinan Berusaha	200	25.000	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan elaksanaan Perizinan Berusaha	200	25.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data (%)	80	32.094	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data (%)	80	32.094	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	1	32.094	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	1	32.094	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang diolah dikaji dan dimanfaatkan	1	32.094	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang diolah dikaji dan dimanfaatkan	1	32.094	
TOTAL PAGU					4.835.551					5.170.355	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan hasil identifikasi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029. Untuk usulan program masayakat dan pokok pokok pikiran DPRP untuk tahun 2027 belum ada untuk saat ini karena menunggu pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan dan tingkat Kota yang baru akan dilaksanakan pada awal Tahun 2026.

Usulan program dan kegiatan Tahun 2027 terlampir sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
KOTA SALATIGA

Nama Perangkat Daerah :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

2.6 Inovasi

Inovasi di bidang urusan penanaman modal yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat adalah kegiatan “**Boss Kupat**” yang merupakan akronim dari Bimbingan OSS Kegiatan Usaha On The Spot. Inovasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha berupa legalitas kegiatan usaha, DPMPTSP Kota Salatiga Kota Salatiga melalui pendampingan dan konsultasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di lokasi usaha, seperti pasar , car free day, bazar UMKM dan lokasi lain sesuai permintaan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah “pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul”, dan juga diarahkan pada Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup, dengan Prioritas Pembangunan, diarahkan pada:

- a. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan;
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga
- c. Meningkatkan jaminan pemerliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan;
- d. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian serta diversifikasi produk pangan untuk peningkatan ketahanan pangan daerah;
- f. Peningkatan kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penguatan tenaga kerja terampil untuk meningkatkan daya dukung investasi berbasis teknologi informasi.
- g. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota
- h. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang yang berkualitas serta penataan ruang
- i. Penguatan tata Kelola pemerintahan untuk optimalisasi program penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat

Untuk mencapai prioritas tersebut maka tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga ini adalah : **Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi**

penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Kota Salatiga.

Pada tahun 2027 indikator atas tercapainya tujuan tersebut adalah Persentase peningkatan investasi di Kota Salatiga dengan target sebesar 6,92%. Penentuan target tujuan tersebut selain berdasarkan Rencana Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025 – 2029, juga melalui evaluasi hasil capaian Renja DPMPTSP Tahun 2025. Dimana hasil capaian persentase peningkatan investasi di Kota Salatiga pada Tahun 2025 adalah sebesar 76,91%. Penentuan target 6,92% atas indikator Persentase peningkatan investasi di Kota Salatiga tahun 2027 masih mengacu pada capaian indikator Tahun 2024 sebesar 6,89%.

Sedangkan sasaran penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah; **meningkatnya realisasi investasi di Kota Salatiga dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota.**

Pada tahun 2027 indikator atas tercapainya sasaran tersebut adalah Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN dengan target sebesar 6,92%. Penentuan target tujuan tersebut selain berdasarkan dokumen Rencana Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025 – 2029, juga melalui evaluasi hasil capaian Renja DPMPTSP Tahun 2025. Dimana hasil capaian Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN Kota Salatiga pada Tahun 2025 adalah sebesar 76,91%. Penentuan target 6,92% atas indikator Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Salatiga tahun 2027 masih mengacu pada capaian indikator Tahun 2024 sebesar 6,89%.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional / Rumus	Satuan	Capaian 2024	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
	Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Penambahan atau pengurangan barang modal dalam kurun waktu 1 thn *(dihitung oleh BPS)	%	-	42,44	41,55	40,62
	penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Kota Salatiga	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Salatiga dengan indikator sasaran pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN	Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN	$\frac{((\text{nilai investasi PMA dan PMDN tahun } n) - (\text{nilai investasi PMA dan PMDN tahun } n-1))}{(\text{nilai investasi PMA dan PMDN tahun } n)} \times 100$	%	6,98	76,91	6,92	6,98
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh kemudahan perizinan dengan indikator sasaran jumlah izin usaha yang diterbitkan	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	Jumlah izin selama setahun	ijin	4.332	3.676	3.000	3.000
		Meningkatnya minat dan realisasi investasi berskala nasional	Jumlah proyek investasi berskala nasional yang dilakukan investor	Jumlah proyek investasi berskala nasional selama setahun	proyek	361	451	370	370

Selain itu DPMPTSP Kota Salatiga juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara urusan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	SATUAN	Capaian 2025	TARGET TAHUN	
					2027	2030
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{((\text{nilai investasi tahun } n) - (\text{nilai investasi tahun } n-1))}{(\text{nilai investasi tahun } n) \times 100}$	%	6,89	6,92	6,98

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga juga menetapkan program dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2027 yang merupakan program kegiatan yang disusun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga mengacu pada prioritas dan sasaran Pembangunan yang disusun pada level kota Tahun 2027 yang dapat ditunjukkan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Kota	Progam	Aktivitas
1	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif;	Peningkatan Investasi dan Iklim Investasi yang Kondusif dengan tujuan menarik lebih banyak modal, mempermudah usaha, dan menciptakan lingkungan yang stabil bagi investor.	Percepatan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Promosi potensi daerah melalui pembuatan Katalog Investasi Daerah yang komprehensif (berisi data potensi, regulasi, dan feasibility study) serta Pemasaran digital dan konten visual (video, infografis) mengenai potensi investas

3.4 Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya iklim investasi yang kompetitif dan sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi DPMPTSP Kota Salatiga menetapkan arah kebijakan sebagai berikut;

- a. Pemberian insentif fiskal. penyederhanaan prosedur perizinan. serta peningkatan transparansi dan kepastian hukum untuk menarik investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan forum investasi. dan pemanfaatan platform digital untuk memperkenalkan potensi daerah dan sektor unggulan kepada investor domestik dan asing.
- c. Mengembangkan dan menerapkan standar pengawasan yang jelas. konsisten. dan terukur untuk memastikan kualitas pelaksanaan pengawasan.
- d. Mempercepat proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai perizinan usaha dalam satu platform online.
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di setiap sektor yang terlibat melalui pelatihan. pembinaan. dan penyediaan infrastruktur.

NSPK	Arah Kebijakan Renstra PD	Arah Kebijakan Renja 2027
1	2	3
Peningkatan penanaman modal yang berkualitas	Penyederhanaan prosedur perizinan. pemberian insentif fiskal, serta peningkatan transparansi dan kepastian hukum untuk menarik investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Sosialisasi Perwali RUPM dan Perda Perijinan Berusaha lebih intensif
Promosi penanaman modal yang inovatif	Meningkatkan penyelenggaraan forum investasi. dan pemanfaatan platform digital untuk memperkenalkan potensi daerah dan sektor unggulan kepada investor domestik dan asing.	Pameran investasi , melakukan kurasi proyek Investasi Ready, integrasi portal promosi geo spasial, penyelenggaraan one on one bisnis matching
Peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan berusaha	Mengembangkan dan menerapkan standar pengawasan yang jelas. konsisten. dan terukur untuk memastikan kualitas pelaksanaan pengawasan	Menyusun dan mengembangkan SOP pengawasan yang lebih baik, Digitalisasi system pengawasan,
Peningkatan pelayanan perijinan	Mempercepat proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai perizinan usaha dalam satu platform online	Percepatan MPP digital sektor kesehatan
Peningkatan pelayanan terpadu satu pintu	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di setiap sektor yang terlibat melalui pelatihan. pembinaan dan penyediaan infrastruktur.	Pelatihan kompetensi berbasis digital, Pelatihan Kantor Sendiri.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sesuai dengan tahapan kebijakan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025 -2029, maka pada rencana kerja Tahun 2027 kegiatan prioritas adalah : Peningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan PTSP melalui penataan SDM, sarana dan prasana pendukung serta penyederhanaan prosedural dan mekanisme perizinan dengan fokus kemudahan perijinan usaha bagi kegiatan penanaman modal di Kota Salatiga .

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tahun 2027 di atas antara lain adalah keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Rumusan program dan kegiatan dalam rencana kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2027 adalah penjabaran tahunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Dimana dalam penjabaran Program dan kegiatan yang dirumuskan telah diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran strategis Wali Kota Salatiga seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029. Program prioritas Wali Kota Salatiga untuk Tahun 2025 -2029 salah satunya adalah “PROGRAM SIAKAS (SALATIGA AKUNTABEL, KOLABORATIF, ADAPTIF,DAN SIGAP” , Dimana dalam salah satu uraian programnya adalah membuat sistem terintegrasi sebagai asistensi masyarakat dengan pemda, memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, catatan sipil dan Perijinan UMKM dan Mall Pelayanan Publik sebagai pusat layanan publik terpadu. Program prioritas tersebut telah masuk dalam perumusan program dan kegiatan renja Tahun 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Begitu pula dengan program prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam hal program prioritas Perwujudan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan dan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis, perumusan program dan kegiatan renja Tahun 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga telah disusun untuk mendukung program prioritas tersebut.

Tabel rencana Dukungan program dan kegiatan terhadap Kebijakan Tematik terdapat dalam Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Dukungan program dan kegiatan terhadap Kebijakan Tematik

No.	Jenis Kebijakan Tematik	Program	Aktivitas
1.	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui peningkatan kemudahan dalam berinvestasi	Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal Penyelenggaraan forum bisnis (investor gathering) dan city expo tahunan Pembuatan Katalog Investasi Daerah yang komprehensif Mempertemukan (business matching) antara pelaku UMKM/industri kecil dengan industri besar yang membutuhkan bahan baku local. Pembentukan Satuan Tugas Khusus untuk penyelesaian masalah investasi (Satgas / Dewan Investasi)
		Program Promosi Penanaman Modal untuk meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal	Partisipasi aktif dalam pameran investasi regional, nasional, dan internasional
2.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal melalui kemudahan perizinan berusaha	Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) secara penuh dan efisien. Simplifikasi dan pemangkasan birokrasi perizinan non-OSS.
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Edukasi masif mengenai literasi dan keamanan digital bagi pelaku usaha. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
3.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan cara meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Penyediaan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja DPMPSTSP Tahun 2027 maka uraian garis besar rekapitulasi Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga untuk Tahun 2027 antara lain sebagai meliputi 6 Program, 12 Kegiatan dan 39 Sub

Kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program: Indeks Kepuasan Masyarakat, Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan dan Nilai SAKIP perangkat daerah.

Sifat penyebaran lokasi Program dan Sub Kegiatan ini terfokus pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.

Pagu yang dibutuhkan : Rp. 4.515.628.000,- (Empat miliar lima ratus lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Berisikan kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan Perencanaan, penganggarkan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan kebutuhan pagu sebesar Rp 4.171.000,- yang bersumber dari PAD Kota Salatiga, dengan sub kegiatan: (1) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan kebutuhan pagu sebesar Rp 2.923.152.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU dan PAD Kota Salatiga. Sub kegiatan ada dua yaitu : (1)Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan kebutuhan pagu sebesar Rp 2.667.578.000,- yang bersumber dari DAU, dan (2)Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN dengan kebutuhan pagu sebesar Rp 255.574.000- yang bersumber dari PAD Kota Salatiga.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah, dengan kebutuhan pagu sebesar Rp 20.859.000,- , dengan Sub Kegiatan (1) Pengamanan Barang Milik Daerah dengan kebutuhab pagu sebesar Rp 20.859.000,- yang bersumber dari PAD Kota Salatiga.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan total kebutuhan pagu sebesar Rp 125.158.000,- , dengan rincian Sub Kegiatan (1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 125.158.000,- yang bersumber dari PAD Kota Salatiga.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan total kebutuhan pagu sebesar Rp 250.269.000,- yang bersumber pendanaan dari PAD Kota Salatiga, dengan sub kegiatan : (1)Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, (2)Penyediaan peralatan rumah tangga, (3)Penyediaan bahan logistic kantor, (4)Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, (5)Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Fasilitas kunjungan tamu, (6)Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp 400.000.000,- yang sumber

pendanaannya bersal dari PAD Kota Salatiga, dengan sub kegiatan (1)Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kebutuhan dana sebesar Rp 495.141.000,- yang sumber pendanaannya direncanakan dari PAD Kota Salatiga, dengan sub kegiatan: (1)Penyediaan jasa surat menyurat, (2)Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, (3)Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kebutuhan dana sebesar Rp 296.878.000,- yang sumber pendanaannya direncanakan berasal dari PAD Kota Salatiag, dengan sub kegiatan: (1)Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan, (2)Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, (3)Pemeliharaan mebel, (4)Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, (5)Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator Program: Nilai Investasi berskala nasional PMA dan PMDN

Sifat penyebaran lokasi Program dan Sub Kegiatan ini ada di wilayah Kota Salatiga dengan fokus sasaran para pelaku usaha yang ada di seluruh wilayah di Kota Salatiga.

Untuk melaksanakan program ini pada Tahun 2027 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 153.251.000,- (Seratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang sumber pendanaannya berasal dari PAD Kota Salatiga.

Berisikan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegaiaian (1) Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, (2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, (3)Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator Program: Jumlah investor berskala nasional

Sifat penyebaran lokasi Program dan Sub Kegiatan ini ada di wilayah Kota Salatiga dengan fokus sasaran para pelaku usaha yang ada di seluruh wilayah di Kota Salatiga.

Untuk melaksanakan program ini pada Tahun 2027 dibutuhkan anggaran

sebesar Rp 104.307.000,- (Seratus empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), yang sumber pendanaannya berasal dari PAD Kota Salatiga.

Berisikan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: (1)Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dan (2)Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Program: Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan

Sifat penyebaran lokasi Program dan Sub Kegiatan ini ada di wilayah Kota Salatiga dengan fokus sasaran para pelaku usaha yang ada di seluruh wilayah di Kota Salatiga.

Untuk melaksanakan program ini pada Tahun 2027 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 240.709.000,- (Dua ratus empat puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah), yang sumber pendanaannya berasal dari PAD Kota Salatiga.

Berisikan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan (1) Penyediaan Pelyanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan (2) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Program: Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha

Sifat penyebaran lokasi Program dan Sub Kegiatan ini ada di wilayah Kota Salatiga dengan fokus sasaran para pelaku usaha yang ada di seluruh wilayah di Kota Salatiga.

Untuk melaksanakan program ini pada Tahun 2027 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 124.366.000,- (Seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang sumber pendanaannya berasal dari PAD Kota Salatiga.

Berisikan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: (1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, (2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku

Usaha, (3) Pengawasan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator Program: Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data.

Sifat penyebaran lokasi Program dan Sub Kegiatan ini ada di wilayah Kota Salatiga dengan fokus sasaran para pelaku usaha yang ada di seluruh wilayah di Kota Salatiga.

Untuk melaksanakan program ini pada Tahun 2027 diusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 32.094.000,- (Tiga puluh dua juta Sembilan puluh empat ribu rupiah), yang sumber pendanaannya berasal dari PAD Kota Salatiga.

Berisikan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan

Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: (1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

TABEL 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.772.933.000,00							5.029.013.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.772.933.000,00							5.029.013.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.772.933.000,00							5.029.013.000,00	
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						4.180.823.230,00						-	4.494.700.000,00	
		[Meningkatkan dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	93,69 77,4 100	89,25 76,9 100	90 77 100	92,3 77,1 100	4.180.823.230,00			-	-	-	-	4.494.700.000,00	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			6 dokumen	4.171.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
40																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	4.171.950,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2.684.266.216,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	3.151.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.667.578.415,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.133.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	232.854.622,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		233.574.622,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang	-			1 Dokumen	20.859.752,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetap kan regulasi yang memb erikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, m eningkatkan n daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	19.927.373,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	20.859.752,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetap kan regulasi yang memb erikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, m eningkatkan n daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		19.927.373,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian OPD	2	0	0	1	125.158.510,00								
	2.18.01.2.05.0002 -	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0	0	1	41.719.503,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	0,00	
	2.18.01.2.05.0009 -	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40	0	0	20	83.439.007,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	0,00	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum	30 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	250.269.575,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetap kan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	-	-	315.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.105.897,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	-	1 Paket	8.916.487,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.172.083,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	14.489.291,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	36.476.537,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	-	1 Paket	40.124.191,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	38.503.012,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	42.353.313,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.158.846,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	13.374.730,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.132.371,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Laporan	11.145.609,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	131.720.829,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Laporan	144.892.912,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang pengadaan barang milik daerah	3	0	0	1	254.563.246,00						1	317.444.782,00	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	0	0	1	114.247.709	Salatiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	132.178.975	
	2.18.01.2.07.0006 -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	0	1	140.315.537	Salatiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	185.265.807	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa umum	-			3 Dokumen	329.080.875,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal,	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.066.186,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Laporan	5.572.804,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	131.720.829,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Laporan	144.892.912,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	186.965.378,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	-	1 Laporan	233.080.708,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	296.878.484,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	-	1 Dokumen	448.655.330,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	75.992.786,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetap kan regulasi yang memb erikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, m eningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6 Unit	83.592.065,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	33.436.826,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetap kan regulasi yang memb erikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, m eningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20 Unit	36.780.508,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	10.132.371,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20 Unit	11.145.609,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	75.992.786,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50 Unit	83.592.065,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	101.323.715,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 10 Menetapkan regulasi yang memberikan kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Unit	111.456.086,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						153.251.454,00						-	75.373.582,00	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	642,83	599,19	636,44	638,03	153.251.454,00	-	-	-	-	-	639,63	75.373.582,00	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	-			1 Dokumen	114.938.591,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah 01 Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	75.373.582,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.01.0001 -	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)													
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	48.848.901,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01 Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	35.373.582,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 10 Menetap kan regulasi yang memb erikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, m eningkatka n daya dukung sarana dan prasarana investasi	Pelaku Usaha	1 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah 10 Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Pelaku Usaha	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38.312.863,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah 01 Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						104.307.272,00						-	0,00	
		[Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal]	Jumlah investor berskala nasional	370	363	367	370	104.307.272,00	-	-	-	-	-	370	0,00	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi penanaman modal	-			1 Paket	104.307.272,00			Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 04 Peningk atan fasilitasi pe ngemban n jaringan pemasaran produk-pro duk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana per dagangan yang tersta ndarisasi	Pelaku Usaha	1	111.817.951,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 04 Peningk atan fasilitasi pe ngemban n jaringan pemasaran produk-pro duk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana per dagangan yang tersta ndarisasi	Pelaku Usaha	1 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi	Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	24.307.272,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 04 Peningk atan fasilitasi pe ngemba n jaringan pemasaran produk-pro duk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana per dagangan yang tersta ndarisasi	Pelaku Usaha	1 Dokumen	31817951,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						254.313.000,00						-	254.313.000,00	
		[Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko]	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	98.5	97.64	97.75	97.8	254.313.000,00	-	-	-	-	-	-	254.313.000,00	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	15000 ljin	3000 ljin	3000 ljin	3000 ljin	240.709.090,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01 Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha	3000 ljin	248.484.336,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15000 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	180.531.817,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01. Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	186.363.252,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	120 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	30.088.637,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01. Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	31.060.542,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01.0008 -	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	4 kegiatan Usaha	1 kegiatan Usaha	1 kegiatan Usaha	1 kegiatan Usaha	30.088.637,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01 Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha	1 kegiatan Usaha	31.060.542,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5,	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						124.366.363,00						-	140.807.790,00	
		[Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal]	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	75	67	67	67	124.366.363,00	-	-	-	-	-	-	140.807.790,00	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha kewenangan kab/kota yang menjadi sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal	-			200 Pelaku Usaha	124.366.363,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01 Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	140.807.790,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan	Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01 Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha.	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	580 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	74.366.363,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01 Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	90.807.790,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1000 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01 Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						32.094.545,00						-	33.131.245,00	
		[Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80	0	80	80	32.094.545,00	-	-	-	-	-	-	33.131.245,00	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola	2 Laporan			1 Laporan	32.094.545,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01 Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha	1 Laporan	33.131.245,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen			1 Dokumen	32.094.545,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew irausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah 01 Peningk atan daya saing perek onomian daerah dengan fokus pada peningkata n kinerja di sektor perd agangan, industri dan usaha kecil menengah	Pelaku Usaha		33.131.245,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							4.835.551.954,00							4.843.659.932,00	

4.2 Tematik

Pada tahun 2027 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kota Salatiga tidak ada rencana kerja dan pendanaan khusus untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM bidang penanaman modal, Program Strategis Nasional (ProSN), tematik lainnya sesuai bidang urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kota Salatiga pada rencana kerja tahun 2027. Namun rencana kerja yang disusun merupakan program kegiatan yang mendukung secara tidak langsung pencapaian program prioritas daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang diseleksi secara strategis dari indikator dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025 – 2029.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten /kota	%	6,89	6,89	6,91	6,92	6,94	6,96	6,98	6,98
2	Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN	%	6,89	6,89	6,91	6,92	6,94	6,96	6,98	6,98

Capaian kinerja IKU penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal dapat dilihat dari tabel berikut:

Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target		Capaian		Kinerja	
			2024	2025	2026	2025	2026 tw I	2025	2026 tw I
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten /kota	%	6,89	6,89	6,91	76,91	- 78,73	1.116,01	-1.139,44
2	Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN	%	6,89	6,89	6,91	76,91	- 78,73	1.116,01	-1.139,44

5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Salatiga Tahun 2025-2029 tertuang pada tabel berikut :

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Setiap Tahun				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	%	6,89	6,89	6,91	6,92	6,94	6,96

Capaian kinerja IKK penyelenggaran bidang urusan penanaman modal dapat dilihat dari tabel berikut:

Kinerja Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target		Capaian		Kinerja	
			2024	2025	2026	2025	2026 tw I	2025	2026 tw I
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	%	6,89	6,89	6,91	76,91	- 78,73	1.116,01	- 1.139,44

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2027 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025- 2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah yang telah ditetapkan.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2027 ini antara lain:

Dari pagu yang disediakan oleh tim anggaran Pemerintah Kota Salatiga tersebut belum memasukkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal, karena besaran alokasinya belum diketahui secara pasti nilainya. Sehingga pada saat alokasi DAK NF sudah ditetapkan akan masuk dalam pagu anggaran DPMPTS Tahun 2027.

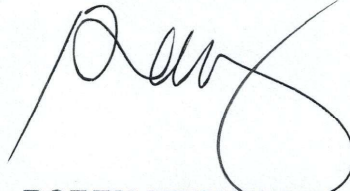
Pada setiap pelaksanaan kegiatan DPMPTSP berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rencana Kerja ini sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan program/kegiatan perangkat daerah tahun 2027. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2027 nantinya tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga serta peran aktif stakeholder yang terkait.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja DPMPTSP Kota Salatiga ini disusun dengan kaidah sebagai panduan operasional yang bisa langsung dipakai dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Prinsip umum dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah Keterpaduan dimana kegiatan Renja harus selaras dengan Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, rencana provinsi/nasional, dan dokumen perencanaan terkait (RTRW, Renja OPD lain). Keterlibatan pemangku kepentingan yaitu pelibatan pelaku usaha, masyarakat, OPD teknis, asosiasi, DPRD sejak perencanaan sampai evaluasi. Dalam pelaksanaan

prioritas program ditetapkan berdasarkan data potensi, hambatan, dan dampak ekonomi-sosial. Asas Akuntabilitas & transparansi selalu digunakann dalam pelaksanaan rencana kerja, dimana mekanisme pelaporan dan informasi publik terbuka dan dapat diakses dengan mudah (seperti realisasi investasi, perizinan). Kaidah berikutnya adalah fokus pada hasil (outcome) bukan hanya keluaran administratif; dalam pelaksanaan renstra juga mengukur perubahan iklim investasi dan kepuasan pengguna layanan. Selanjutnya kaidah efisiensi & efektivitas anggaran juga menjadi perhatian dalam melaksanakan prioritas anggaran pada program yang berdampak tinggi. Yang paling akhir adalah kaidah keterukuran. Dimana tujuan renstra dipecah ke indikator yang jelas, target kuantitatif dan kualitatif, serta baseline data yang akurat. Dari indikator tersebut menjadi acuan kinerja pelaksanaan rencan kerja organisasi perangkat daerah setiap tahun.

WALI KOTA SALATIGA,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to read 'Robby Hernawan'.

ROBBY HERNAWAN